

# Petrus Cik

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 16-Apr-2024 08:25PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2275612232

**File name:** Petrus\_Cik.docx (213.49K)

**Word count:** 1040

**Character count:** 7178

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA BATU PERIODE  
2016-2022**

**SKRIPSI**

**AKUNTANSI**



OLEH:

**PETRUS CIK**

NIM: 2020110111

**KONSENTRASI PERPAJAKAN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2024**

## **RINGKASAN**

Pajak daerah mempunyai peranan yang besar dalam mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu sedang melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah periode 2016–2022. jenis studi deskriptif kuantitatif tertentu. Sumber data sekunder yang digunakan adalah tujuan dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Dalam analisisnya, deskripsi adalah metode yang digunakan. Meski bervariasi, penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Batu seringkali lebih efektif pada tahun 2016 hingga 2022. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pemungutan pajak daerah Kota Batu dalam meningkatkan PAD, mendorong pembangunan daerah, dan mendukung pelayanan publik. Namun mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah juga memerlukan pemantauan dan penilaian yang lebih ketat dan teratur, serta perencanaan dan penetapan tujuan yang lebih ideal dan praktis di tingkat daerah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) harus melakukan perencanaan, bekerja sama dengan lebih banyak pihak terkait dalam kolaborasi dan koordinasi, meningkatkan pemantauan dan penilaian, serta mendukung sosialisasi dan edukasi masyarakat.

***Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Daerah.***

## <sup>4</sup> BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kemajuan berkelanjutan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Menurut Risnaningsih dkk. (2021) dan Suhendri dkk. (2021), penerimaan pajak merupakan salah satu unsur penyumbang pembangunan nasional. Suatu bangsa, wilayah, atau komunitas dapat menggunakan pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan, kemajuan, dan kesejahteraannya. Pembangunan dapat mencakup berbagai elemen, termasuk masalah sosial, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Perpajakan merupakan suatu alat pengaturan yang digunakan negara untuk menghimpun atau memperoleh pembayaran sukarela dari wajib pajak yang berhutang. Dalam sistem ini, pajak menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian bertanggung jawab mengelola dana tersebut untuk mendanai pengeluarannya (Risnaningsih, Suhendri, Lutfiyanto, 2022). Menurut <sup>5</sup> Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam menghasilkan pendapatan bagi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pencapaian otonomi daerah. Di antara sumber-sumber utama gaji daerah yang menjadi sumber utama subsidi daerah adalah gaji unik provinsi (bantalan), cadangan penyesuaian, kredit daerah, dan bentuk-bentuk pendapatan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi daerah berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong

berbagai inisiatif kemajuan provinsi dan meningkatkan perekonomian wilayah dengan cara ini.

Menurut Julie dan Retno (2015:8), tiga komponen struktur pilihan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment system*

Pemerintah (fiscus) mempunyai kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan orang pribadi berkat cara pemungutan tersebut.

2. *Self Assessment System*

memberikan masyarakat umum kemampuan untuk menentukan tanggung jawab perpajakan mereka sendiri sebagai cara memungut pajak.

3. *With Holding system*

Suatu proses pemberian tugas dimana jumlah pengeluaran yang harus dibayar oleh warga negara ditentukan oleh pihak luar dan bukan oleh otoritas pengeluaran atau pihak lain yang terlibat langsung.

Tugas pengawasan dan pengaturan keluarga dalam rangka peningkatan upah teritorial berada pada legislator setempat. Pemerintahan daerah provinsi diberi tugas menggunakan keahliannya untuk menetapkan strategi yang dapat meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan kelancaran administrasi sesuai dengan ciri-ciri yang diuraikan dalam Peraturan <sup>2</sup> Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus, pajak daerah harus dipungut secara konsisten untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat lokal.

Keputusan telah diambil untuk membagi dua satuan kerja, BKAD dan BAPENDA, menjadi organisasi independen berdasarkan sinopsis Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, restrukturisasi organisasi ditunjukkan pada kasus Kota Batu yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang dibentuk melalui penggabungan BKAD dan BAPENDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Wilayah Kota Batu, pemerintah provinsi seharusnya menyusun sebelas kategori tugas yang tidak biasa. Selain biaya untuk aset dan bantuan non-logam, pungutan ini mencakup jasa penginapan, makan, dan hiburan. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam menggalang dana yang diperlukan untuk menopang berbagai inisiatif pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Batu. Selain itu, pajak atas periklanan, air tanah, dan penerangan jalan termasuk dalam bea yang berkaitan dengan pajak. Penting untuk diingat bahwa ada pajak tambahan untuk konstruksi dan penggunaan lahan, pajak sarang burung walet, dan biaya yang terkait dengan perolehan tanah. Dengan demikian, sistem perpajakan yang diatur secara formal dalam peraturan daerah juga menyasar berbagai sektor ekonomi dan sumber daya alam untuk pendapatan daerah Kota Batu.

Data yang dikumpulkan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mencapai tujuan pendapatan fiskal mereka. Pemerintah daerah diperkirakan akan dapat berfungsi lebih menguntungkan jika mereka mampu meningkatkan pendapatan melebihi anggaran mereka. Sebaliknya, hal ini dipandang negatif jika pendapatan aktual lebih rendah dari yang diperkirakan.

Anggaran berfungsi sebagai titik batas pencapaian tujuan, artinya efektivitas BAPENDA kota dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuan semaksimal mungkin. Perolehan pendapatan pajak daerah sangat bergantung pada seberapa baik kinerja BAPENDA Kota Batu. Jumlah riil yang diterima setelah mencapai tujuan pendapatan PAD dan target pendapatan tidak jauh berbeda. Sektor 2004

Mengingat konteks permasalahan dan pokok bahasan penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik pada gagasan penilaian pendapatan dengan menggunakan laporan pelaksanaan anggaran untuk menunjukkan kinerja keuangan Kantor BAPENDA Kota Batu. “**Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu Periode 2016-2022**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang informasi tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah: Seberapa efektifkah penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kota Batu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan menggunakan kesulitan-kesulitan yang diidentifikasi dan dibahas sebagai dasar, penelitian ini mencoba menilai efisiensi pemungutan pajak daerah di kantor BAPENDA Kota Batu pada tahun 2016 hingga 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Ketika memasuki dunia kerja, diharapkan pembelajaran ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari. Laporan

Analisis Efektivitas <sup>6</sup> Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) juga diharapkan dapat dibuat dengan memanfaatkan data penelitian.

#### **1.4.2 Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi**

Terkait dengan Penelusuran Kelayakan Pendapatan Bea dan Cukai Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA), temuan dari peninjauan ini diyakini dapat bermanfaat dan menjadi sumber data bagi pihak-pihak terkait serta kajian lebih lanjut.

#### **1.4.3 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu**

Hasil analisis <sup>9</sup> ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyelidikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kota Batu (BAPENDA) terhadap kelayakan pendapatan belanja daerah.

# Petrus Cik

---

## ORIGINALITY REPORT

---

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a><br>Internet Source         | 2% |
| 2 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                     | 2% |
| 3 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                             | 1% |
| 4 | <a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a><br>Internet Source             | 1% |
| 5 | <a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a><br>Internet Source             | 1% |
| 6 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                             | 1% |
| 7 | <a href="http://estd.perpus.untad.ac.id">estd.perpus.untad.ac.id</a><br>Internet Source   | 1% |
| 8 | <a href="http://issuu.com">issuu.com</a><br>Internet Source                               | 1% |
| 9 | <a href="http://repository.unsimar.ac.id">repository.unsimar.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Petrus Cik

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---